

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SENIN, 11 JULI 2011**

Tahun Sidang : 2010-2011
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Hari/Tanggal : Senin, 11 Juli 2011
Pukul : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keuangan Tahun 2010
Kehadiran : 35 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI
14 orang izin

HADIR :

- ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH
- ◆ Ganjar Pranowo
- ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si
- ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe
- ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH
- ◆ Khatibul Umam Wiranu, M.Hum
- ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS
- ◆ Paula Sinjal, SH
- ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc
- ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
- ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si
- ◆ Drs. Agung Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
- ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus
- ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si
- ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
- ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si
- ◆ Arif Wibowo
- ◆ Alexander Litaay
- ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
- ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
- ◆ Dra. Eddy Mihati, M.Si
- ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill
- ◆ Zainun Ahmadi
- ◆ Hermanto, SE.,MM
- ◆ Aus Hidayat Nur
- ◆ TB. Soenmandjaja.SD
- ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si
- ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e
- ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH
- ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si
- ◆ Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I
- ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si
- ◆ Mestariyany Habie, SH
- ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
- ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si

IZIN :

- ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA
- ◆ Drs. H. Djufri
- ◆ Ignatius Mulyono
- ◆ Sutjipto, SH.,M.Kn
- ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd
- ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH
- ◆ Rusminiati, SH
- ◆ Drs. Soewarno
- ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf
- ◆ Agus Purnomo, S.IP
- ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam
- ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
- ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah
- ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dibuka pukul 14.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pagu anggaran Kemendagri 2010 sebesar 13,59 Triliun, dengan realisasi hingga bulan Desember 2010 sebesar 12,10 Triliun atau 89,02%.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kemendagri telah mendapatkan opini WTP pada Tahun 2010 dan terhadap beberapa temuan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, telah disusun Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK RI. Temuan yang bersifat administratif telah diberikan teguran secara tertulis, sedangkan temuan yang bersifat tagihan keuangan/finansial sampai dengan tanggal 7 Juli 2011 telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara sebesar 1,70 Miliar dan sisanya sebesar 7,72 Miliar dalam proses penyelesaian. Terkait dengan tindaklanjut temuan yang belum diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang ada batas toleransi waktu penyelesaiannya sampai akhir Juli 2011.
3. Terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Kemendagri Tahun 2010 pagu APBN Kemendagri yang bersumber dari PNBP sebesar 26,16 Miliar dan terealisasi sebesar 5,60 Miliar.
4. Alokasi Pagu Definitif Kemendagri Tahun 2011 adalah sebesar 15,21 Triliun. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI tanggal 15 Nopember 2010 perihal Realokasi Anggaran Kemendagri (BA 010) ke BNPP (BA 111) sebesar 454 Miliar, total alokasi anggaran Kemendagri berubah menjadi 14,75 Triliun. Alokasi anggaran Tahun 2011 berdasarkan Pagu Definitif tersebut, telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, diantaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar 9,58 Triliun, dan kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar 2,47 Triliun.
5. Rincian Pelaksanaan anggaran Tahun 2011 terdistribusi pada 13 Program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis/UPT), serta dikedirahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, adalah sebagai berikut:
 - Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik (pelaksana Ditjen Kesbangpol), sebesar 139 Miliar.
 - Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (pelaksana Ditjen PUM) sebesar 202,57 Miliar, termasuk alokasi dana dekonsentrasi sebesar 38,97 Miliar dan tugas pembantuan sebesar 38,99 Miliar.
 - Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (pelaksana Ditjen Otda) sebesar 265,80 Miliar, termasuk alokasi dana dekonsentrasi sebesar 42,39 Miliar dan alokasi dana tugas pembantuan sebesar 61,04 Miliar.
 - Program Bina Pembangunan Daerah (pelaksana Ditjen Bina Bangda), sebesar 235,83 Miliar, termasuk alokasi dana tugas pembantuan sebesar 42,50 Miliar.

- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (pelaksana Ditjen PMD) sebesar 10,03 Triliun, termasuk alokasi dana dekonsentrasi sebesar 451,04 Miliar, alokasi dana Tugas Pembantuan sebesar 116,91 Miliar, dan alokasi anggaran Urusan Bersama sebesar 7,18 Triliun.
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan (pelaksana Ditjen Dukcapil), sebesar 2,58 Triliun, termasuk alokasi dana dekonsentrasi sebesar 10 Miliar.
 - Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah (pelaksana Ditjen Keuda) sebesar 61,10 Miliar.
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemendagri (pelaksana Sekretariat Jenderal) sebesar 217,07 Miliar, termasuk didalamnya alokasi dana Dekonsentrasi sebesar sebesar 9,02 Miliar.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri (pelaksana Sekretariat Jenderal) sebesar 519,48 Miliar, yang diperuntukan bagi pembangunan sarana prasarana pendidikan IPDN di 4 (empat) Kampus Daerah, yaitu di Kabupaten Agam (Sumbar), Kabupaten Rokan Hilir (Riau), Kabupaten Minahasa (Sulut) dan Kabupaten Gowa (Sulsel).
 - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri (Pelaksana Itjen) sebesar 43,84 Miliar.
 - Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri (pelaksana Badan Litbang) sebesar 35,10 Miliar.
 - Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri (pelaksana Badan Diklat) sebesar 153,73 Miliar termasuk alokasi dana dekonsentrasi sebesar 4,50 Miliar.
 - Program Pendidikan Kepamongprajaan (pelaksana IPDN) sebesar 269,47 Miliar.
6. Kemendagri telah mengajukan Usulan APBN-P Tahun Anggaran 2011 sebesar 2,26 Triliun, dari total usulan tersebut, terdapat kegiatan Prioritas Nasional yaitu PNPM-MP sebesar 1,90 Triliun atau 84,11%, dan usulan kebutuhan untuk prioritas Kemendagri sebesar 359,64 Miliar atau 15,89%. Dengan rincian untuk :
- Pembangunan tahap pertama Kampus IPDN di 3 Daerah (Papua, NTB dan Kalbar), yang diperuntukkan untuk penyediaan prasarana pendidikan kepomongprajaan, usulan sebesar 100 Miliar.
 - Pembangunan Tahap Pertama Gedung Kantor Pusat Kemendagri yang akan diperuntukkan untuk relokasi Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk Data Centre Kependudukan dan Ditjen Pemerintahan Umum yang saat ini masih menempati gedung kantor milik Kementerian/Lembaga lain, serta Ditjen Keuangan Daerah, usulan anggaran sebesar 73 Miliar .
 - Dukungan Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Kemendagri, usulan anggaran sebesar 10,10 Miliar.
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah, usulan sebesar 5 Miliar.

- Kerjasama Kemendagri dengan Ormas/LSM/LNL dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri usulan sebesar 22,50 Miliar.
 - Dukungan Sarana dan Prasarana Pemerintahan melalui mekanisme Tugas Pembantuan (TP), usulan sebesar 50 Miliar.
 - Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP), untuk memenuhi cakupan pelaksanaan PNPM-MP tahun 2011 dimana masih terdapat kekurangan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada 1661 kecamatan di 326 kabupaten pada 32 provinsi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 April 2011, usulan sebesar 1,90 Triliun.
 - Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana di IPDN Kampus Cilandak, untuk mendukung penyelenggaraan operasional pendidikan program S1, (rehabilitasi asrama, aula, kelas, ruang kerja dosen dan wisma serta penyiapan IPDN Kampus Cilandak yang akan menerima Praja tingkat akhir (Nindya Praja) sebanyak 200 Praja pada bulan September 2011, usulan sebesar 10,83 Miliar.
7. Kebutuhan tambahan maupun penyesuaian alokasi anggaran dalam APBN-Perubahan Tahun 2011 sebesar 2,26 Triliun, diharapkan dapat dipenuhi dari sumber anggaran berupa usulan penggunaan kembali belanja penghematan Tahun 2011, sebesar 163,05 Miliar; dan usulan tambahan anggaran, sebesar 2,10 Triliun.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional menyampaikan paparannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2010. Selanjutnya Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mempertahankan opini WTP dari BPK tersebut di tahun-tahun mendatang.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk terus meningkatkan efektivitas pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan sehingga tingkat penyerapan anggaran bisa lebih dioptimalkan.
3. Komisi II DPR RI menyetujui penggunaan kembali belanja penghematan tahun 2011 sebesar **Rp163.052.191.000,- (seratus enam puluh tiga miliar lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** yang diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dialokasikan pada kegiatan-kegiatan sebagaimana rincian pada dokumen yang telah disampaikan kepada Komisi II DPR RI.
4. Terkait dengan usulan tambahan anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp2.100.760.547.000,- (dua trilyun seratus miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** yang di dalamnya termasuk anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP) sebesar **Rp1.904.175.000.000,- (satu**

trilyun sembilan ratus empat miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Komisi II DPR RI pada prinsipnya dapat menyetujui usulan tersebut, namun demikian Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar terlebih dahulu menyampaikan rincian pengalokasian anggaran masing-masing kegiatan, untuk selanjutnya dibahas lebih mendalam dengan Komisi II DPR RI.

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.

**JAKARTA, 6 JULI 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

**GANJAR PRANOWO
A-365**